

## ELECTRONIC DISBURSEMENT INFORMATION SYSTEM (SiPECEL) AND MONITORING EVALUATION (e-MONEV) IN ORDER TO CREATE TRANSPARENCY OF PUBLIC SERVICES IN BLITAR REGENCY

**Ibnu Romdon**

Magister Manajemen Universitas Islam Kadiri

Email: nareshwary25@gmail.com

### **Abstract**

*This study aims to test and describe the extent of the Electronic Disbursement Information System (SiPecel) and Monitoring Evaluation (e-Monev) in an effort to provide convenience related to the realization of disbursements both direct and indirect expenditure in the district of Blitar quickly and in real time. In this case, an innovation and breakthrough are needed to increase the success of appropriate, fast and accurate services through the creation of an Electronic Disbursement Information System (SiPecel). An android application that presents information (1) SP2D Number, (2) SP2D Date, (3) Date of Disbursement, (4) Beneficiary, (5) Amount, (6) Receiving Bank and (7) Remarks. Whereas Monitoring Evaluation (e-Monev) presents information (1) Realization of SKPD Budget, (2) Recapitulation of All SKPD, (3) Percentage of Budget Absorption, and (4) Ranking of SKPD Budget Absorption. It is expected to be able to assist the regional government in presenting information to the Regional Work Unit (SKPD) in Blitar Regency for goods / services providers, treasurers and stake holders as well as communities related to Budget Realization.*

*For the next stage, applications that were initially desktop-based were refined to become web-android-based, which can later be accessed wherever we are, making it easier and faster for local government servants to provide goods / services and treasurers.*

*Kata Kunci: Ibnu Romdon, (SiPECEL) dan e-Monev (Sipecel) & Evaluasi Monitoring (Emoner) Di Kabupaten Blitar*

### **A. Latar Belakang Teoritis**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang diterapkan dalam APBD. Pengeluaran Daerah meliputi belanja langsung dan tidak langsung. Belanja tidak langsung seperti gaji sedangkan belanja langsung adalah belanja barang/jasa dan modal.

Kemajuan realisasi keuangan dan fisik anggaran belanja pada kenyataannya tidak sesuai dengan rencana, selalu terjadi penumpukan pencairan anggaran belanja di akhir tahun. Hal tersebut sudah menjadi pola belanja para pengguna anggaran dan belum ada perubahan serta sudah menjadi masalah klasik sehingga mengurangi

efektifitas belanja pemerintah sebagai motor pertumbuhan.

Faktor yang berpengaruh adalah proses pengadaan barang/jasa, berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah beserta perubahannya Nomor 04 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah, PPK bertanggung jawab terhadap semua tahapan dalam pengadaan barang/jasa, dimulai dari perencanaan hingga selesainya pelaksanaan pekerjaan termasuk pembayaran atas tagihan yang diajukan oleh penyedia. Apabila proses pelaksanaan bisa selesai sesuai rencana maka proses penyerapan akan dapat berjalan dengan baik. Selesainya pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan berita acara serah terima pekerjaan yang ditanda tangani penyedia dan panitia penerima hasil pekerjaan dan menjadi dasar bagi penyedia untuk dapat melakukan/mengajukan penagihan atas pekerjaan tersebut kepada kementerian/lembaga Satuan kerja

perangkat daerah/instansi yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (BPKAD). Setelah melalui beberapa prosedur pembayaran, maka dari penerbitan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) selanjutnya pemindah bukuan sejumlah uang dari kas Negara ke rekening yang berhak. Penyedia barang/jasa selama ini harus antri dan datang bolak-balik ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) untuk mengecek langsung apakah pembayarannya sudah transfer atau belum. Dalam upaya mendukung e-Government yaitu suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik, pada tahun 2015 Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bersama-sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) membuat aplikasi Sistem Pencairan Elektronik (SiPECEL) di komputer anjungan. Aplikasi ini menyajikan informasi status pencairan baik belanja langsung maupun tidak langsung anggaran yang ada di Kabupaten Blitar. Dengan Aplikasi ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Blitar dan penyedia barang/jasa dapat mengecek pencairan anggaran lebih mudah dan real time.

## B. Metode Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sugiyono (2011:15) menyimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawan eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sample sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Oleh karena itu, strategi penelitian ini terarah pada penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

Bogdan dan Taylor mengatakan metodologi kualitatif sebagai prosedur-prosedur penelitian yang digunakan untuk menghasilkan data deskriptif, yang ditulis atau yang diucapkan orang dan perilaku-perilaku yang dapat diamati, Pawito (2007:84).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, sedangkan jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bermaksud untuk melihat, mengetahui, menggambarkan, dan menganalisis fenomena tertentu sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan peristiwa nyata yang terjadi di lapangan melalui proses wawancara, observasi, maupun dokumentasi sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh.

Meleong, mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Herdiansyah, 2010: 9)

.Berdasarkan hasil dan survei dilapangan dan studi kepustakaan, secara konseptual dan praktis serta didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa media yang tepat pendekatan penelitian yang dipilih adalah Studi kasus, karena peneliti rasa paling tepat menggunakan metode ini untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana gambaran dalam rangka pelaksanaan Aplikasi SiPecel dan e-monev yang ada di Kabupaten Blitar. dalam Tahap pengembangan kinerja dan serapan anggaran didukung oleh pembuatan aplikasi Sipecel dan E-Monev sebagai upaya dalam mempercepat Proses Pencairan dan Realisasi Anggaran. Selain mengembangkan Aplikasi tersebut, peneliti menyusun sejumlah instrumen terkait dengan hasil yang dikembangkan. Instrumen yang disusun yaitu evaluasi monitoring anggaran dalam bentuk format grafik untuk mengetahui sejauh mana layak

dan tidaknya aplikasi yang digunakan, dan instrumen untuk mengetahui tingkat keefektifan aplikasi yang telah dikembangkan. Pada tahap uji aplikasi, langkah yang dilaksanakan adalah pengenalan aplikasi kepada masyarakat baik melalui media online maupun sosialisasi dalam rapat koordinasi dan pelatihan.

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan responden uji coba produk dengan teknik Purpose Sampling dengan kriteria sebagai berikut:

1. Teknis IT yang membidangi Penyusunan program Aplikasi Sipecel dan e-monev pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar;
2. Pelaksana Teknis Simda sebagai admin dari Pengelolaan Program pada BPKAD Kabupaten Blitar yang telah memiliki Kopetensi yang handal;
3. Operator dan Bendahara Simda Keuangan sebagai Pelaksana Teknis di masing-masing OPD di Kabupaten Blitar;

Aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrument evaluasi produk dalam bentuk format penilaian untuk mengetahui kelayakan produk yang diberikan kepada 23 responden.

Teknik analisa data untuk mengukur kelayakan dari produk ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Rumus yang digunakan untuk menghitung rata-rata tiap aspek penilaian adalah sebagai berikut:

$$x = \frac{\sum x}{n}$$

Keterangan x : rata-rata

$\sum x$  : jumlah penilaian n : jumlah soal

Setelah dihitung, rata-rata hasil penilaian diklasifikasikan menjadi lima kategori yaitu: 1

= tidak tepat/tidak jelas/tidak mudah/tidak menarik/tidak berguna; 2 = kurang tepat/kurang jelas/kurang mudah/kurang menarik/kurang berguna; 3 = tepat/jelas/mudah/menarik/berguna; 4 = sangat tepat/sangat jelas/sangat mudah/sangat menarik/sangat berguna. Dari hasil rata-rata klasifikasi responden, dicari nilai rata-

rata total keseluruhan, kemudian diambil kesimpulan mengenai produk yang diujikan.

Klasifikasi penilaian rata-rata total keseluruhan dibagi menjadi empat kategori yang disajikan pada tabel 1.

Tabel 1 Kriteria Rata-rata Total Keseluruhan Penilaian

Kriteri	Persentase	Interpretasi
a		
1	0 – 25 %	Sangat Tidak Layak
2	25 – 50%	Kurang Layak
3	50 – 75%	Cukup Layak
4	75 – 100 %	Layak

### C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Selanjutnya, hasil perhitungan rata-rata keseluruhan terhadap pengembangan sistem website yang mencakup aspek kerja, penggunaan, kemudahan, kemenarikan, dan kejelasan, diperoleh nilai rata-rata 76%. Nilai 76% dalam skala 0–100% termasuk dalam kategori “Layak”.

Bagian ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan. Sedangkan bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, menginterpretasikan penemuan secara logis, mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan.

Selanjutnya Dinas Kominfo Kabupaten Blitar dan BPKAD Kabupaten Blitar merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Adapun Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja pada Pemerintah Kabupaten Blitar mengeluarkan sebuah aplikasi yang bernama aplikasi Sistem Pencairan Elektronik (SiPECEL) dan e-Monev adalah aplikasi yang mengintegrasikan proses pengumpulan data, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan

anggaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran dalam rangka mewujudkan kinerja pelaksanaan program dan anggaran yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Sistem ini dikembangkan oleh tim Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bersama-sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Sistem ini dikembangkan oleh tim yang dibentuk oleh Sekretaris Jendral sebagai sarana pengendalian internal dalam rangka monitoring pelaksanaan anggaran pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Monitoring pelaksanaan anggaran tersebut diberlakukan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah hingga membantu penyedia layanan dalam memperoleh informasi pengajuan penagihan pembayaran yang mereka ajukan dimanapun mereka berada tanpa harus datang secara langsung ke BPKAD maupun computer anjungan SiPECEL. Sistem ini dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan pimpinan OPD dalam melaporkan pelaksanaan anggaran dan program di lingkungan Pemerintah kabupaten Blitar kepada Bupati, DPRD, Internal dan masyarakat terutama terkait dengan pelaksanaan kunci yang terdiri dari rencana kegiatan terutama terkait dengan pelaksanaan kunci yang terdiri dari rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD), instruksi bupati dan kegiatan prioritas pemerintah daerah. Dalam rangka memudahkan transaksi data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tersebar diseluruh wilayah di kabupaten blitar, maka sistem dikembangkan dalam bentuk online berbasis web yang diintegrasikan dengan website [www.sipecel.blitarkab.go.id](http://www.sipecel.blitarkab.go.id) dan website [www.emonev.blitarkab.go.id](http://www.emonev.blitarkab.go.id)

Sedangkan fungsi dari SiPECEL dan e-Monev sebagai alat penyediaan data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran dalam rangka mewujudkan kinerja pelaksanaan program dan anggaran yang transparan, efisien, efektif dan akuntabel.

Mengukur Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kinerja pelaksanaan anggaran juga mencerminkan besaran pencapaian program pemerintah dalam hal menggerakkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan juga sebagai sarana untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah terhadap publik. Selain itu kinerja pelaksanaan anggaran juga memberikan bukti seberapa jauh satuan kerja dalam hal menggunakan anggaran sesuai dengan target yang akan dicapai dan seberapa besar kegiatan kunci yang telah dicapai. Melalui SiPecel dan e-Monev dapat memantau pelaksanaan anggaran pada satuan kerja. Hasil monitoring dan evaluasi (monev) dapat digunakan sebagai feedback dalam proses penyusunan anggaran di tahun mendatang. Selain itu juga sebagai bahan pertimbangan review baseline dan penyusunan alokasi anggaran; dan Sebagai “early warning” capaian kinerja anggaran tahun berjalan.

Sistem Pencairan Elektronik (SiPECEL) dan e-Monev Aplikasi Sistem Informasi Pencairan Elektronik (SiPECEL) merupakan aplikasi yang inovatif karena :

- a. Aplikasi ini hanya dengan membaca database SIMDA Keuangan yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bisa diambil data status pencairan dan resume penyerapan anggaran.
- b. Aplikasi murni dibuat secara mandiri oleh pemerintah daerah tanpa meminta bantuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aplikasi SiPECEL sebelumnya berbasis desktop, menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0 dengan database Microsoft SQL Server 2000. Sedangkan aplikasi yang dikembangkan saat ini secara otomatis mampu menjembatani data dari 2 platform database yang berbeda, yaitu dari Microsoft SQL Server 2000 ke

database MySQL sehingga dengan mudah dikembangkan ke aplikasi berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP.

- c. Aplikasi Sistem Informasi Pencairan Elektronik (SiPECEL) berbasis android merupakan hasil dari konversi SiPECEL web base ke dalam file\*.apk
- d. Aplikasi e-Monev mengambil data SiPECEL dan ditampilkan dalam bentuk angka dan grafis sehingga menampilkan laporan penyerapan anggaran

Tujuan dan Fungsi SiPECEL dan e-Monev SiPECEL dan e-Monev berfungsi sebagai alat penyediaan data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran dalam rangka mewujudkan kinerja pelaksanaan program dan anggaran yang transparan, efisien, efektif dan akuntabel.

Aplikasi SiPECEL dan e-Monev disusun untuk memenuhi kebutuhan pimpinan Daerah dalam melaporkan pelaksanaan anggaran kepada Bupati, DPRD, lembaga internal, dan masyarakat. Aplikasi ini juga disusun untuk mempercepat akses pelaporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Blitar dan untuk mempermudah transaksi data dari Organisasi Perangkat Daerah yang tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Blitar

Langkah-Langkah Penggunaan Aplikasi SiPECEL dan e-Monev

Dalam rangka implementasi keberhasilan sistem tersebut, seluruh satuan kerja berkewajiban melakukan persiapan secara mandiri dari seluruh aspek infrastruktur, penyusunan laporan dan penggunaan sistem. Adapun hal-hal yang harus disiapkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Blitar dalam rangka implementasi SiPECEL dan e-Monev pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah antara lain:

1. Menunjuk person in charge (PIC) sebagai orang yang bertanggungjawab dalam mengelola sistem sekaligus sebagai penghubung dari satuan kerja kepada tim monitoring pelaksanaan

anggaran Pemerintah Kabupaten Blitar.

2. Dalam rangka percepatan implementasi SiPECEL dan e-Monev, satuan kerja dapat membentuk tim monitoring pelaksanaan anggaran anggaran pada tingkat satuan kerja.
3. Melakukan identifikasi dan telaah atas pelaksanaan kegiatan kunci yang tertuang dalam dokumen RKA yang mencakup anggaran dan sasaran.
4. Menyusun rencana serapan anggaran (Disbursement plan) untuk pagu anggaran yang tertuang dalam DPA berdasarkan jenis belanja.
5. Menyusun target bulanan dari setiap pelaksanaan kegiatan kunci.
6. Melaporkan realisasi serapan anggaran berdasarkan dokumen SP2D yang telah terbit secara bulanan.
7. Melaporkan capaian target bulanan dari pelaksanaan kegiatan kunci yang disertai dengan realisasi anggaran berdasarkan dokumen SP2D dan didukung dengan bukti dokumen lainnya.
8. Membuat rancangan pelaporan berdasarkan formulir yang telah disiapkan guna mempermudah pada saat proses entri data.
9. Melaporkan seluruh rangkaian pelaksanaan anggaran sistem SiPECEL dan e-Monev yang telah disediakan.

Hasil yang diperoleh dalam pemanfaatan Sistem Informasi Elektronik (SiPecel ) dan Evaluasi Monitoring (Emonev) di Kabupaten Blitar

Strategi pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pencairan elektronik (SiPECEL) dan E-Monev dilakukan secara bertahap. Tahap pertama pada tahun 2015, sebagai inovasi awal yang dilakukan adalah membaca data base SIMDA Keuangan dari Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang kemudian diolah dan di tampilkan dalam aplikasi SiPECEL berbasis desktop pada tahun 2017 dilanjutkan dengan pengembangan ke dalam aplikasi berbasis web dan android.

Dalam rangka pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pencairan elektronik (SiPECEL) ada beberapa pihak yang terlibat, Pihak-pihak tersebut adalah :

1. Badan Pengawasan Keuangan dan

- Pembangunan (BPKP), sebagai pembuat data base SIMDA Keuangan.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aser daerah (BPKAD), sebagai leading Sektor pengelola SIMDA Keuangan
  3. Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagai pengembang aplikasi.
- Keluaran/output yang dapat dihasilkan adalah :

- a. Aplikasi SiPECEL menampilkan Status Pencairan Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah (SKPD) yang telah ditransfer ke penyedia barang/jasa, meliputi Nama SKPD, Nomor SP2D, Tanggal SP2D, Tanggal Pencairan, Penerima, Jumlah, Bank Penerima dan Keterangan
- b. Aplikasi E-Monev menampilkan realisasi penyerapan anggaran keuangan di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), rekap seluruh SKPD, prosentase penyerapan anggaran, dan rangking penyerapan anggaran SKPD.

#### Dampak Sebelum dan Sesudah

Dalam pembahasan ini akan mendeskripsikan dampak Melihat kondisi dan sebelum adanya aplikasi SiPECEL bahwa pihak penyedia barang/jasa khususnya harus datang langsung ke kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Mereka tidak hanya datang sekali, akan tetapi beberapa kali untuk beberapa kali pengajuan pencairan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak. Sangatlah kurang efektif dan efisien, di sisi lain mengganggu pekerjaan karena harus antri dan berjubel untuk melihat di buku pencairan. Dengan adanya aplikasi SiPECEL di komputer anjungan penyedia sudah terbantu tanpa harus antri, karena aplikasi ini dengan cepat dapat menampilkan posisi pencairan yang mereka ajukan secara real time. Demikian juga dengan bendahara- bendahara yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di seluruh Kabupaten Blitar dapat melihat proses pencairan anggaran belanja masing-masing Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) diseluruh Kabupaten Blitar dapat melihat proses pencairan

anggaran belanja masing- masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk aplikasi lain yaitu E-Monev, manfaat yang diperoleh adalah pemerintah daerah dapat memantau langsung realisasi anggaran belanja keuangan setiap Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Blitar secara real time, yang sebelumnya hal tersebut tidak dapat dilakukan. Tampilan dalam memonitor serta mengevaluasi apakah realisasi tersebut sudah sesuai dengan yang direncanakan.

Saat ini dengan adanya aplikasi Si PECEL berbasis web dari android, para pihak menjadi lebih semakin dipermudah lagi dalam mengecek pencairan anggaran dimana pun dan kapan pun.

#### D. Kesimpulan

Diperlukan kedisiplinan dalam menjalankan tugas yang dibebankan sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga dapat meningkatkan konsistensi pelaksanaan anggaran dan realisasi penyerapan anggaran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a) Dengan adanya Aplikasi SiPecel maupun E-Monev yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat memberikan pelayanan yang cepat dan baik kepada masyarakat dalam hal ini adalah penyedia barang/jasa dan mempermudah pekerjaan bagi pihak-pihak yang ada di pemerintah daerah
- b) Mempermudah dalam penggunaan dan controlling pengawasan anggaran belanja daerah; secara real time pada masing-masing OPD

#### E. Rekomendasi

Dari hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya goal congruence serta komunikasi yang efektif antara atasan dengan bawahan. Dengan demikian perbedaan persepsi, pemahaman, dan arah tujuan dari penggunaan teknologi dapat diminimalisir sehingga dapat

- mengoptimalkan tujuan yang ingin dicapai.
2. Kemampuan sumberdaya manusia terhadap penggunaan teknologi informasi harus sesuai dengan desain tugas yang diberikan. Sehingga diperlukan pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keilmuan dan kompetensi pengguna sehingga cepat beradaptasi dengan sistem yang baru;
  3. Operator keuangan di dalam lingkungan Badan Pengelolaan dan Aset Daerah dihadapkan dengan berbagai tugas dengan berbagai aplikasi yang mewajibkan untuk digunakan, dilaporkan dan ini menjadi indikasi kelebihan beban kerja dalam tugas sebagai operator keuangan. Sehingga diperlukan tambahan petugas operator keuangan yang baru;
  4. Diperlukan kedisiplinan dalam menjalankan tugas yang dibebankan sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga dapat meningkatkan konsistensi pelaksanaan anggaran dan realisasi penyerapan anggaran;
  5. Pada tahap pengembangan selanjutnya, dapat ditambahkan fitur pelaporan penyerapan dan pencairan anggaran, baik belanja langsung maupun tidak langsung;
- F. Referensi**
- BPKAD. 2017. Laporan Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2017 di Enam Organisasi Perangkat Daerah
- Chang, Liu. 2012. Impact of E-government on the Government Performance Management. International Conference on Education Technology and Computer
- Chua, A. dan Lam, W. 2005. Why KM projects fail: A multi-case analysis. *Journal of Knowledge Management*, 9(3): 6-17
- Dishaw, M. T., & Strong, D. M. 1999. Extending the technology acceptance model with task-technology fit constructs. *Information & Management*, 36: 9-21
- Fisher, G Joseph. 1998. Contingency Theory, Management Control System and Firm Outcomes: Past Results and Future Directions, *Behavioural Research in Accounting* Vol. 10.
- Gea, A.A. 2006. Integritas Diri: Keunggulan Pribadi Tangguh. *Character Building Journal*, 3 (1): 16-26
- Gebauer, Judith; Shaw, Michael J.; dan Michele L. Gribbins. 2006. Task-Technology Fit for Mobile Information Systems. Working paper.
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Goodhue, Dale L., & Thompson, Ronald, L. 1995. Task-Technology Fit and Individual Performance. *MIS Quarterly*, June: 6-15.
- Gordon, L.A., & Miller, (1976). A Contingency Framework for the Design of Accounting Information System. *Accounting, Organization and Society*: 59- 69
- Group Meta, SearchCIO.com. 2005. Executive Guide: IT Governance. Diakses pada 11 Juli 2008 dari <http://www.kpmg.ca/en/services/advisory/err/inforiskmgmt.html>
- Gujarati, D.N. 2005. Basic Econometrics. 5th Ed. McGraw-Hill. New York
- Jensen, M., & Meckling, O. 1976. Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost And Ownership Structure. *Jurnal of Financial Economics* 3 (4): 305-360.
- Juliani, Dian., & Sholihin, Mahfud. 2014. Pengaruh Faktor-Faktor Kontekstual Terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa. 11 (2): 177 -199.
- Kareem, Mohanad Ali., & Haseeni, Zeena Jabber. 2015. E-Government and Its Impact on Organizational Performance. *International Journal of Management and Commerce Innovations* 3 (1): 672-664
- Kenis, Izzettin. 1979. Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial

- Attitudes and Performance. *The Accounting Review* 54 (4): 707-721
- Kuncoro, E.D (2013), Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Aplikasi SIPP Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Dinas PU prov. Kaltim. e- Jurnal.adbisnis.fisip-unmul.ac.id 1 (4): 364-373
- Kurniadi, Denny. 2015. Pengembangan Sistem Informasi Rencana Kerja Dan Anggaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*. 8 (1):
- Lembaga Administrasi Negara. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance (Modul 1 dari 5). Jakarta.
- Mahsun, M. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Media Indonesia. 2012, Januari 31. e-MPA Kiat Pantau Serapan Anggaran. Ekonomi MI
- Otley, David. . T. 1980. The contingency theory of management. *Accounting, Organization, and Society* 5(4): 413-428
- Parker, Wayne C. 1993. Performance Measurement In The Public Sector. State Of Utah.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2014 tentang Monitoring Pelaksanaan Anggaran Secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga.
- Pasoloran, Oktavianus, Pengaruh Perceived Enviroment Uncertainty (PEU) terhadap hubungan antara Karakteristik Sasaran Penganggaran dengan Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada Kawasan Industri Makasar), Simposium Nasional Akuntansi 5, Semarang, tanggal 5 – 6 September 2002, hal. 756 - 774.
- Prastowo, Nono Agung. 2014. Penerapan dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. *Jejaring Administrasi Publik*. VI (1): 520-528
- Putra., R B., & Sensus., D., I. 2008. Rancangan Tata Kelola TI Untuk Institusi Pemerintah Studi Kasus Bappenas. *Jurnal Sistem Informasi MTI-UI*. 4 (1)
- Ratmono, Dwi., & Suryani, Rita. 2016. Anteseden Dan Konsekuensi Keberhasilan Implementasi Performance-Based. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20 (1):
- Ross, Jeanne., & Weill, Peter. 2004. Recipe For Good Governance, *CIO Magazine*, 15 June 2004, 17, (17).
- Rozai , M. A., & Subagiyo, L. 2015. Optimalisasi Penyerapan Anggaran Dalam Rangka Pencapaian Kinerja Organisasi (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Boyolali). *Jurnal Manajemen Sumberdaya Manusia*. Vol. 9 No. 1 Juni 2015: 72 – 89
- Scoot, W.R. 2009. *Financial Accounting Theory Fifth Edition*. Canada Prentice Hall.
- Simons, R. 2000. *Performance Measurement And Control Systems For Implementing Strategy*. Prentice Hall